PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PADA WILAYAH PESISIR DI DESA AKUNI, KECAMATAN TINANGGEA, KABUPATEN KONAWE SELATAN

La Gandri¹ dan Muhsimin²

¹Jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan

²Tribumi Mandiri Konsultan Lingkungan

E-mail: lagandri1988@gmail.com

ABSTRAK

The development of coastal areas continues to grow rapidly in line with the fairly high population growth rate. This study aims to determine the level of community perceptions of mangrove ecosystem management in the coastal area of Akuni Village. The method used is descriptive qualitative analysis to explain the actual conditions at the research location through surveys and in-depth interviews of 10 assessment indicators. The results showed that the level of community perception towards mangrove ecosystem management on the coast of Akuni Village was in the high category. The relatively low socio-economic conditions of the community are not an obstacle in managing mangrove management in Akuni Village in the future because a good understanding of coastal resources, especially mangrove ecosystems, is increasing along with the understanding and actualization of the direct and indirect benefits felt by coastal communities in several the last decade.

Keywords: Community Perception, Mangrove Ecosystem, Coastal, Akuni Village

PENDAHULUAN

Mangrove merupakan tipe hutan yang tumbuh di sepanjang pantai dan muara sungai beriklim tropis dan subtropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove juga dikenal sebagai wilayah pembatas dan peralihan yang menghubungkan antara dua ekosistem (darat dan laut) dengan produktifitas dan kompleksitas ekologi lingkungan yang khas, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu komponen sumberdaya alam pesisir yang multifungsi dengan pengaruh yang luas (Kusmana 2003). Kondisi mangrove di Indonesia saat ini cenderung mengalami tekanan berat oleh ekstraksi pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan untuk memenuhi ragam kebutuhan penduduk yang jumlahnya makin bertambah. Total luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 3.489.140,68 ha dengan laju degradasi mencapai 23% dalam kurun waktu 1980

sampai 2009, sehingga luas hutan dalam kondisi baik mencapai 1.671.140,75 ha dan 1.817.999,93 ha dalam kondisi rusak (KLHK 2017). Kerusakan ekosistem mangrove secara umum disebabkan oleh tingginya ketergantungan masyarakat pesisir dalam aspek manfaat guna memenuhi berbagai kepentingan ekonomis yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kelestarian secara ekologis.

Wilayah pesisir Desa Akuni secara administrasi terletak di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas ekosistem mangrove di Kabupaten Konseil Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 mencapai 11.852,57 ha dengan laju degradasi hutan mencapai angka 33% dalam kurun waktu 2009 sampai 2011 (Yusuf 2017). Berdasarkan riset terbaru diketahui bahwa trend perubahan luas ekosistem mangrove di Desa Akuni sendiri yang terjadi pada tahun 2005-2015 mencapai angka 26,57% atau dari luas total

awal 62,28 ha berkurang hingga 19,62 ha. Faktor utama disebabkan oleh kegiatan antropogenik masyarakat seperti konversi lahan untuk tambak ikan dan udang yang dikelola secara tradisional serta penebangan liar untuk kayu bakar (Muhsimin, 2018).

Pengelolaan ekosistem mangrove merupakan bagian dari pembangunan wilayah pesisir, dimana pelaksanaanya lebih diarahkan secara komprehensif, partisipatif, berazaskan konservasi dan restorasi lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Memahami perilaku dan hubungan masyarakat dengan sumberdaya merupakan langkah penting dalam meminimalisir kemungkinan timbulnya kerusakan lingkungan yang lebih besar, serta mempermudah pengambilan keputusan dalam pengelolaan mangrove sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Analisis persepsi masyarakat pesisir akan sangat menentukan apakah masyarakat mengerti tentang kawasan mangrove bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan pesisir dalam kaitan dengan pengelolaan kawasan mangrove tersebut agar tetap lestari. Oleh Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat pesisir terhadap pengelolaan kawasan mangrove di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2018 di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2008). Deskripsi penelitian lebih memfokuskan

pada persepsi masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove di pesisir Desa Akuni. Variabel penelitian ditekankan pada kriteria persepsi masyarakat tentang pengelolaan kawasan mangrove yang dijabarkan dalam sepuluh kriteria penilaian. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana populasi dan sampel dipilih secara representatif yang sifatnya homogen berdasarkan pertimbangan seluruhnya adalah masyarakat yang memanfaatkan kawasan mangrove dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jumlah 56 kepala keluarga. Jumlah sampel yang diambil ditentukan berdasarkan persamaan yang dikemukakan oleh Ernawati, (1997) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Dimana n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

D = Derajat kesalahan

Pengumpulan data, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuisioner serta observasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu: (1) sangat setuju atau sangat tahu diberi skor 5, (2) setuju atau cukup tahu diberi skor 4, (3) ragu-ragu atau abstain diberi skor 3, (4) tidak setuju atau tidak tahu diberi skor 2, (5) sangat tidak setuju atau sangat tidak tahu diberi skor 1. Jawaban pernyataan kriteria tersebut disusun menjadi lima kategori seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori persepsi masyarakat berdasarkan Skala Likert (Saptoni 2003)

Skor	Kisaran Skor	Keterangan
1	1.0 - < 1.8	Sangat tidak setuju/sangat tidak tahu
2	1.8 - < 2.6	Tidak setuju/tidak tahu
3	2.6 - < 3.4	Raguragu/kurang tahu/biasa-biasa
4	3.4 - < 4.2	Setuju/cukup tahu
5	4.2 - < 5.0	Sangat setuju/sangat tahu

Catatan: Kisaran skor dan rata-rata skor diperoleh dengan rumus:

Interval kelas:

$$R_s = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Jumlah kelas}} \\ = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Rataan skor:

$$\bar{X} = \sum \left(\frac{\text{Skor pertanyaan} - \text{frekuensi skor}}{n} \right)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian persepsi masyarakat pesisir tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Akuni menunjukkan bahwa secara umum persepsi masyarakat terbagi dalam dua kategori jawaban yaitu setuju dan tidak setuju. Distribusi jawaban yang berbeda-beda pada setiap kriteria pertanyaan secara lengkap disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil analisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem mangrove

Skor	Kriteria penilaian	Nilai skor rata-rata	Ket.
P1	Kerusakan ekosistem mangrove karena faktor alam	1.95	Tidak setuju

Skor	Kriteria penilaian	Nilai skor rata-rata	Ket.
P2	Kerusakan ekosistem mangrove karena faktor manusia	4.05	Setuju
P3	Kerusakan ekosistem mangrove karena kepentingan ekonomi	4.10	Setuju
P4	Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir	1.95	Tidak setuju
P5	Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak	3.52	Setuju
P6	Pengelolaan hutan mangrove tanggung jawab bersama	3.71	Setuju
P7	Penegakkan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai	1.90	Tidak setuju
P8	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove meningkat	3.76	Setuju
P9	Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan	1.95	Tidak setuju

Skor	Kriteria penilaian	Nilai skor rata-rata	Ket.
P10	Pemerintah Daerah, sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik	1.90	Tidak setuju

Sumber: Data Primer diolah 2018

Persepsi berhubungan dengan kecerdasan emosional seorang individu dalam menggunakan emosinya atas dasar pilihan informasi yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap suatu obyek (Maskendari 2006). Oleh sebab itu, persepsi merupakan dasar individu tersebut bersikap atau berperilaku, sehingga mendorong pentingnya mengetahui persepsi masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya yang ada.

1. Kerusakan ekosistem mangrove karena faktor alam

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menyatakantidak setuju kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir Desa Akuni terjadi karena faktor alam. Kondisi ini diperkuat dengan hasil observasi lapangan, dimana kondisi perairan di bagian hulu sungai Akuni tergolong landai sehingga resiko rusaknya ekosistem mangrove karena faktor alam seperti perubahan arus dan gelombang yang dapat menyebabkan abrasi tidak terjadi dikawasan tersebut.

2. Kerusakan ekosistem mangrove karena faktor manusia

Sumbangsi terbesar kerusakan ekosistem mangrove diakibatkan oleh factor manusia dan aktifitasnya. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar masyarakat setuju dengan pernyataan tersebut, meskipun mereka kurang mengetahui dampak kerusakan dari ekosistem mangrove itu sendiri.

Masyarakat menyatakan pendapat berdasarkan fakta yang sering mereka jumpai, bahkan beberapa diantaranya termasuk pelaku utama yang melakukan aktifitas pemanfaatan kawasan mangrove seperti penebangan pohon untuk kayu bakar, konversi lahan untuk tambak dan pemukiman.

3. Kerusakan ekosistem mangrove karena kepentingan ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan setuju dengan pernyataan kerusakan ekosistem untuk kepentingan ekonomi. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa meningkatnya kebutuhan hidup dalam beberapa dekade terakhir, pemanfaatan mangrove dianggap lebih efisien dan murah jika dibandingkan membeli barang yang harganya relatif lebih mahal seperti harga bahan bakar minyak (minyak tanah). Kondisi ini mendorong masyarakat untuk merambah hutan mangrove guna memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka sehari-hari. Selain itu, usaha tambak dianggap mampu memberikan peluang pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga konversi lahan untuk usaha tersebut terus dilakukan.

4. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernyataan ini tergolong buruk. Hal ini ditandai oleh sebagian besar jawaban tidak setuju dari masyarakat. Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam daerah tropika yang mempunyai manfaat dengan pengaruh yang sangat luas terhadap wilayah pesisir. Walters et al. (2008) dibeberapa negara berkembang manusia secara langsung bergantung pada sumberdaya pesisir termasuk ekosistem mangrove sebagai pendukung perikanan untuk sumber pendapatan mereka.

Pemahaman masyarakat tentang mangrove lebih mengarah pada aspek ekonomis, seperti perannya dalam tambak dan nilai pemanfaatan langsung yang diperoleh masyarakat dari penangkapan udang, ikan dan kepiting. Beberapa faktor penyebab buruknya persepsi masyarakat di kawasan desa ini adalah rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mangrove sehingga mereka tidak dapat membedakan manfaat penting mangrove bagi lingkungan pesisir secara umum (Muhsimin, 2018).

5. Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang manfaat penting mangrove bagi kegiatan tambak tergolong baik yang diketahui berdasarkan jawaban setuju dari masyarakat. Mangrove memiliki arti penting bagi kegiatan tambak khususnya sistem perakaran tumbuhan tersebut yang dapat memperkuat tanggul tambak itu sendiri sehingga tidak rentan mengalami kerusakan. Dekomposisi serasah mangrove menambah kekayaan unsur hara disekitaran tambak yang dijadikan sebagai makan dari jenis ikan yang dibudidayakan. Fungsi ekologis dari ekosistem mangrove sangat kompleks dan mampu menunjang keberadaan berbagai jenis hewan akuatik yang berasosiasi dengan ekosistem tersebut.

6. Pengelolaan ekosistem mangrove tanggung jawab bersama

Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pengelolaan mangrove menjadi tanggung jawab bersama tergolong baik karena sebagian besar jawaban masyarakat menyatakan setuju. Kustanti (2013) pengelolaan ekosistem mangrove tidak dapat dilakukan secara sepihak, melibatkan banyak pihak atau aktor sangat diperlukan untuk mengendalikan perencanaan, pengelolaan

dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan yaitu menerapkan konsep yang berbasis pada social ekosistem dengan tujuan untuk memelihara, menjaga kelestarian dan integritas ekosistem, sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat (Huda 2008).

7. Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai

Persepsi masyarakat terkait penegakan hukum lingkungan tergolong buruk yang ditandai dengan jawaban tidak setuju dari sebagian besar masyarakat. Objektifitas penilaian masyarakat cenderung mengarah pada implementasi aturan formal, karena sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove dan penegakkan aturan secara hukum (pemberian sanksi) belum terlaksana. Hal ini juga ditandai dengan adanya berbagai macam pelanggaran masyarakat seperti penebangan mangrove secara liar namun tidak ditindak lanjuti atau proses hukum terhadap pelanggar tidak dilakukan secara tuntas. Aturan formal dalam konteks nasional tentang kebijakan konservasi dan pengelolaan ekosistem mangrove mengacu pada; UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem; Kepres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan berbagai konvensi internasional seperti RAMSAR Convention, CITES dan sebagainya (Pattimahu 2010).

8. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove meningkat.

Persepsi masyarakat tentang meningkatnya partisipasi dalam pengelolaan mangrove tergolong buruk karena sebagian besar jawaban masyarakat yang menyatakan setuju hanya bermotif ekonomi. Partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela terkait pelestarian mangrove seperti rehabilitasi mangrove masih sangat rendah. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa proses rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir Desa Akuni lebih banyak dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) bina lingkungan dengan jumlah anggota yang terbatas dengan efektivitas kerja yang maksimal. Partisipasi masyarakat yang bermotif ekonomi biasanya menyediakan bibit mangrove untuk ditanaman disekitar bekas tambak yang sudah tidak terpakai. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan mangrove merupakan masalah yang harus diselesaikan melalui beberapa strategi yang tepat agar kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan.

9. Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian kawasan pesisir dan ekosistem mangrove

Perusahaan swasta yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan adalah PT. Ifishdeco yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan industri nikel. Penilaian masyarakat terhadap perusahaan swasta tersebut belum memiliki kepedulian yang cukup baik dalam melestarikan lingkungan termasuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah pesisir. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah setempat, bantuan bersifat langsung dari PT. Ifishdeco selama ini telah disalurkan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dan Comdev (Community

Development). Bantuan tersebut antara lain meliputi pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jembatan, sumur bor untuk irigasi pertanian, pembangunan rumah ibadah dan beasiswa bagi 100 mahasiswa S1, S2 dan S3 yang berasal dari berbagai Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kualitas SDM. Dana Comdev sendiri telah disalurkan sekitar 960 juta rupiah dalam dua tahap. Meskipun anggaran ini telah diprioritaskan untuk 25 desa binaan dari perusahaan tersebut, namun alokasi anggaran untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir seperti penanaman dan pemeliharaan mangrove hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

10. Pemerintah Daerah sudah menjalankan tugas pengelolaan ekosistem mangrove dengan baik

Persepsi masyarakat tentang pengelolaan ekosistem mangrove yang dijalankan oleh pemerintah daerah saat ini dianggap belum maksimal. Hal ini ditandai oleh sebagian besar jawaban sangat tidak setuju dari masyarakat. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa program sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terkait pengelolaan mangrove dari beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan tidak di implementasikan dengan baik. Duke et al. (2007) mengungkapkan struktur pemerintahan yang efektif, kebijakan sosial ekonomi dan strategi mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk membalikkan trend penurunan kawasan hutan mangrove guna memastikan generasi mendatang dapat menikmati jasa ekosistem yang disediakan oleh sumberdaya tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Masyarakat pesisir di Desa

Akuni setuju bahwa; a) Kerusakan ekosistem mangrove karena faktor manusia, b) Kerusakan ekosistem mangrove karena kepentingan ekonomi, c) Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak, d) Pengelolaan hutan mangrove tanggung jawab bersama, e) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove meningkat. (2) Masyarakat pesisir di Desa Akuni tidak setuju bahwa; a) Kerusakan ekosistem mangrove karena faktor alam, b) Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir, c) Penegakkan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai, d) Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, e) Pemerintah Daerah sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017 [internet]. [diunduh 2017 Des 30]. SP.58/HUMAS/PP/HMS.3/03/2017. Tersedia pada: <http://menlhk.go.id>. Bogor
- Duke NC, Meynecke JO, Dittmann S, Ellison AM, Anger K. 2007. A world without mangroves?. *J Science*. 317:41-42.
- Ernawati, 1997. Metode Statistika. Transito, Bandung.
- Huda N. 2008. Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Kusmana C. 2003. Teknik Rehabilitasi Mangrove. Bogor (ID): IPB Press
- Kustanti A. 2013. Evolusi Hak Kepemilikan Dan Penataan Peran Para Pihak Pada Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Dengan Kemunculan Tanah Timbul (Kasus Pada Tanah Timbul Hutan Mangrove di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Maskendari. 2006. Kajian Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Sukadana [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian
- Muhsimin 2018. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Pattimahu DV. 2010. Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Saptorini. 2003. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Mangrove Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Jakarta (ID): CV Alfabeta.
- Walters BB, Ronnback P, Kovacs JM, Crona B, Hussain SA, Badola R, Primavera JH, Barbier E, Dahdouh-Guebas F. 2008. Ethnobiology, Socio-Economics and Management of Mangrove Forests. *J Aquatic Botany*. 89:220-236.
- Yusuf DN. 2017. Strategi Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Berbasis Spasial di Kabupaten Konawe Selatan [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.